

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.
- Dhaniswara K. Harjono, (2020), *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, Cet. 1, Uki Press, Jakarta.
- Eka Nam Sihombing, (2018), *Hukum Kelembagaan Negara*, Pustaka Prima, Medan.
- Fajlurrahman Jurdi, (2020), *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimmy Ashiddiqie, (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Rawls, (2006), *Theory Of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Farida Indra Soeprapto, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tudung Herning Sitabuana, (2020), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Yusuf Munaf, (2014), *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Zulkarnain, (2012), dkk, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal

- Amin Rahmad Panjaitan, (2023), dkk, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, Unnes Law Review, Vol.6, No.2.

Ahmad Arya Saputra, (2024), dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.14.

Christin Nathaina Liu, (2022), dkk, “Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, Lex Privatum, Vol.10, No.5.

Dita Rosalina Arini, (2022), “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Menteri Sekaligus Pimpinan Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.3, No.2.

Haeruman Jayadi, (2022), dkk, “Lembaga Negara Sederajat dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.7, No.2.

Ibnu Arradzie Panigfa, (2023), dkk, “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Saniri, Vol.4, No.1.

May Lim Charity, (2016) “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)”, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol.13, No.1.

- Muhammad Hoiru Nail, (2021), “Kedudukan Lembaga Negara (Utama & Pembantu) Terhadap Trias Politica Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Law Review, Vol.1, No.1.
- Moh. Baris Siregae, (2021), dkk, ”Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Law Reform Jurnal, Vol.1, No.1.
- Sonia Sekar Sari, (2023), dkk, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.4.
- Sri Damayanti, (2025), dkk, “Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan”, Vol.7, No.1.
- Rokilah,(2021), dkk, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.2.
- Tri Novriantika, (2021), dkk, “Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Muhammadiyah Law Review, Vol.5, No.1.
- Yudi Widagdo Harimurti, (2019), “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1.
- Zulfahmi Nur, (2023), “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Islam Syatibi)”, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.6, No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

_____, Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

_____, Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

_____, Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, (Lembara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097).

_____, Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

_____, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 Tentang Keuangan Negara yang Dipisahkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249).

Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244).

D. Website

Dana Pemerintah Cair Untuk PSSI Januari 2025, Total Rp 227 Miliar
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20241210233619-142-1175979/dana-pemerintah-untuk-pssi-cair-januari-2025-total-rp227-miliar>, diakses 11 Maret, 2025, Jam 23 : 41 Wib.

Economics, Sri Mulyani, ungkap dana RP 127,10 Miliar mengalir ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

<https://www.idxchannel.com/economics/srimulyani-ungkap-dana>

rp12710miliar-mengalir-ke-pssi diakses, 6 Maret 2025, Jam 23:40, Wib.

Sekretarian Kabinet Republik Indonesia 22 Oktober 2024

<https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih>

diakses 24 Februari, 2025, Jam 21 :30, Wib.

Suara.com, Erick Thohir Rangkap Jabatan Jika Terpilih Jadi Ketum PSSI,

Pakar Jelaskan Dampak Negatif yang Ditimbulkan

<https://www.suara.com/news/2023/01/15/192545/erick-thohir-rangkap>

jabatan-jika-terpilih-jadi-ketum-pssi-pakar-jelaskan-dampak-negatif-

*yang-ditimbulkan*_diakses 11 Maret, 2025, Jam 01:35, Wib.

Wiki Kamus Arti Kata Larangan *<https://id.wiktionary.org/wiki/larangan>*

diakses, 20 Februari, 2025, Jam 07:30 Wib.